

Publikasi Hasil Riset
Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2015

**MEMPERKUAT PENGORGANISASIAN
MASYARAKAT SIPIL UNTUK MEMPERCEPAT
DEMONOPOLISASI DI POLITIK DAN EKONOMI**

Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) – Departemen Ilmu Politik
FISIP Universitas Indonesia
14 Maret 2016

2015: KONTEKS TAHUN PERTAMA JOKOWI

- ❖ PUSKAPOL FISIP UI -- yang tergabung dalam **Konsorsium Indeks Demokrasi Asia** (*Consortium of Asian Democracy Index – CADI*) bersama dengan sejumlah lembaga riset di Korea Selatan, Filipina, dan Thailand --melakukan riset mengenai Indeks Demokrasi Asia untuk kasus Indonesia tahun 2015. Puskapol UI telah melakukan riset Indeks Demokrasi Asia sejak 2011 hingga 2015 ini.
- ❖ Jalannya tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dilantik pada Oktober 2014 merupakan konteks situasi yang melatarbelakangi hasil Indeks Demokrasi Asia untuk kasus Indonesia pada 2015 ini.

SEKILAS TENTANG METODOLOGI INDEKS

- ❖ Pengembangan Indeks demokrasi Asia didasari oleh pendefinisian kembali demokrasi dengan menjadikan pemaknaan transisi demokrasi sebagai demonopolisasi yang terjadi atas proses dan institusi dalam dimensi **politik, ekonomi, maupun masyarakat sipil**.
- ❖ Dalam upaya mengukur demokrasi (**baca: demonopolisasi**), ada dua prinsip utama yang diperlakukan sebagai variabel: **Liberalisasi** dan **Ekualisasi**.
- ❖ **Liberalisasi** diartikan sebagai *sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri*. Sedangkan **Ekualisasi** dimaknai sebagai *proses sejauh mana kelompok-kelompok minoritas secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan*.
- ❖ Skor indeks didapatkan dari penilaian ahli melalui wawancara tatap muka.

KONSEP DASAR: Variabel dan Sub Variabel

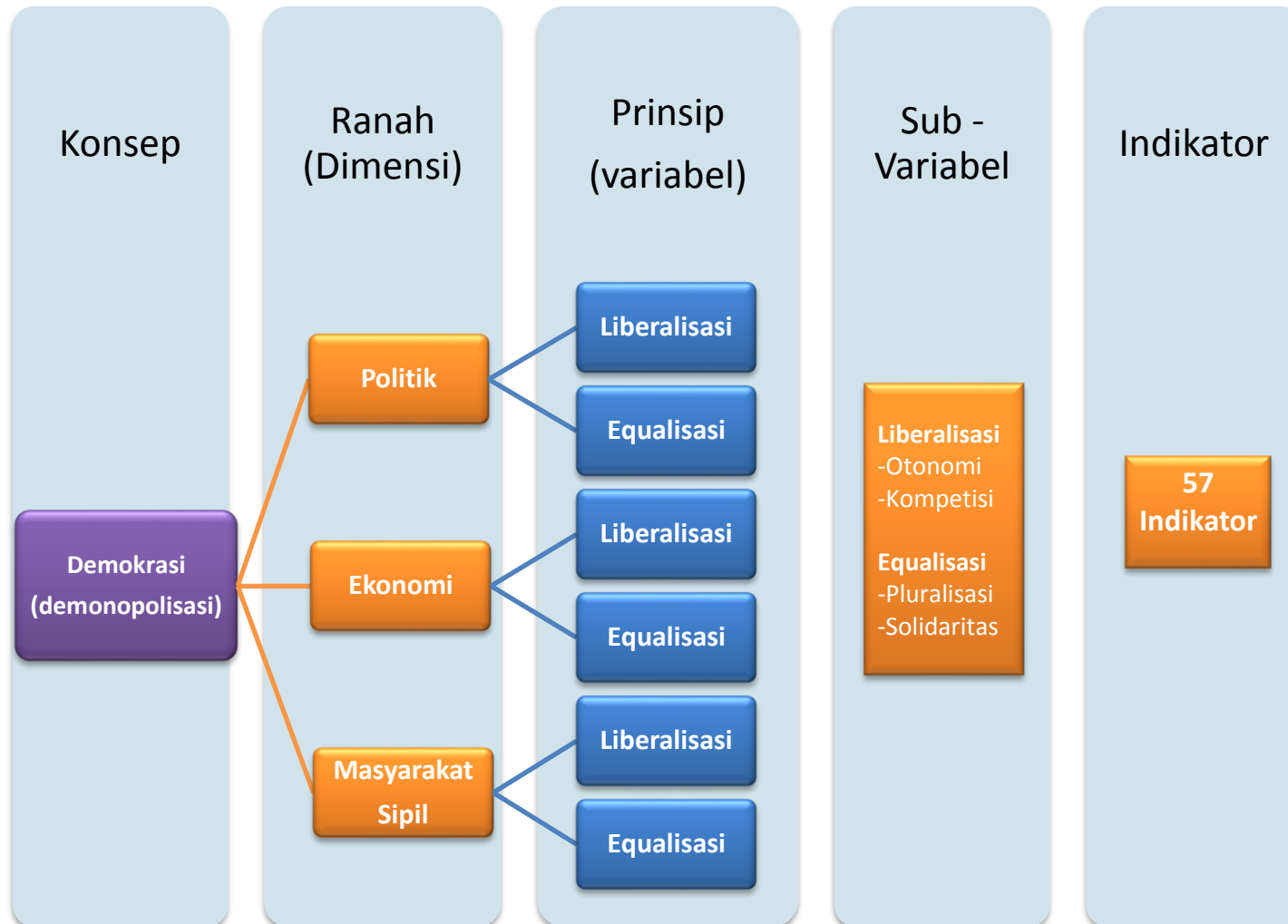
Liberalisasi

- Otonomi
- Kompetisi

Ekualisasi

- Keberagaman
- Solidaritas

OPERASIONALISASI KONSEP



KERANGKA SAMPEL

- ❖ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 27 orang responden ahli menggunakan Instrumen pengukuran berupa kuesioner dengan pertanyaan semi-tertutup
- ❖ Proses pemilihan 27 orang ahli didasarkan pada *purposive sampling* yang berbasis pada penentuan kategori dan kriteria tertentu untuk merepresentasikan spektrum ideologi, posisi, dan peran di masyarakat.
- ❖ Terdapat 3 hal yang dipertimbangkan dalam penentuan responden
 - Area atau bidang keahlian/keterlibatan (Politik, Ekonomi, dan Masyarakat Sipil)
 - Peran di masyarakat (akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan)
 - Posisi ideologis responden ahli

GAMBARAN INDEKS DEMOKRASI ASIA KASUS INDONESIA 2015

Indeks Demokrasi Asia

Kasus Indonesia 2015

Liberalisasi		Ekualisasi		Indeks Demokrasi Indonesia
6,1		5,39		5.81
Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas	
6.04	6.15	5.01	5.73	

Indeks Demokrasi Asia di Indonesia

2015 = 5,81

- ❖ Skor agregat indeks demokrasi untuk kasus Indonesia tahun 2015 (politik, ekonomi, masyarakat sipil) adalah **5,81**,
- ❖ Meningkat dari skor indeks 2014 yang sebesar 5,42.
- ❖ Terjadi kenaikan sebesar 0,39 poin dari skor indeks tahun 2014.
- ❖ Skor pada 2015 ini adalah **yang tertinggi** sejak riset Indeks Demokrasi Asia kasus Indonesia dilakukan pada 2011.

Indeks Demokrasi Asia Kasus Indonesia

2015: Meningkatkan 0,39 poin dari 2014

- ❖ Dilihat dari 2 variabel pembentuknya, skor liberalisasi lebih tinggi (6,1) daripada ekualisasi (5,39). Skor liberalisasi yang berada di kisaran sedang (skor 6 dari skala 1-10) **menunjukkan struktur dan kekuatan otoritarian masih bertahan dalam sistem demokrasi Indonesia di tiga dimensi (politik, ekonomi, masyarakat sipil).**
- ❖ Diperburuk dengan masih relatif **rendahnya skor ekualisasi** pada kisaran sedang (skor 5 dari skala 1-10) yang menunjukkan sempitnya akses warga negara, terutama kelompok-kelompok marginal, pada sumber daya politik, ekonomi dan sosial.
- ❖ Dengan kata lain, masih ada persoalan bagi kelompok-kelompok marginal secara substansial memiliki akses pada sumber daya politik, ekonomi, dan sosial.

Indeks Demokrasi Asia

Kasus Indonesia 2011 - 2015

Tahun	Skor Indeks Demokrasi Indonesia	Selisih
2011	4,99	--
2012	5,32	Naik 0,33
2013	4,97	Turun 0,35
2014	5,42	Naik 0,45
2015	5,81	Naik 0,39

Skor Indeks 2011-2015: Tren Demonopolisasi

- ❖ Dilihat tren skor indeks sejak 2011 hingga 2015 ini, terdapat gejala peningkatan proses demonopolisasi.
- ❖ Terdapat kecenderungan semakin otonom dan independen sektor-sektor di masyarakat dari kekuatan politik lama (otoriter) sehingga dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri, serta relatif meluasnya peluang kelompok marginal untuk memiliki akses terhadap sumber daya.

Skor Liberalisasi dan Ekualisasi Tertinggi pada 2015

Tahun	Liberalisasi	Selisih	Ekualisasi	Selisih
2011	5,49	--	4,50	--
2012	5,60	Naik 0,11	5,02	Naik 0,52
2013	5,23	Turun 0,37	4,71	Turun 0,31
2014	5,79	Naik 0,56	4,82	Naik 0,11
2015	6,10	Naik 0,31	5,39	Naik 0,57

Dapat ditafsirkan bahwa ruang-ruang partisipasi dalam masyarakat untuk mengakses sumber daya politik, ekonomi, dan sosial makin terbuka dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok warga. Jika dilihat skor variabel liberalisasi dan ekualisasi selama 2011-2015 maka proses demonopolisasi terjadi secara bertahap dan pelahan.

Gambaran Indeks Dimensi Politik, Ekonomi, dan Masyarakat Sipil tahun 2015

SKOR INDEKS DIMENSI POLITIK 2015

Dimensi POLITIK	Liberalisasi		Ekualisasi		Skor
	6,81		6,78		6,79
	Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas	
	7,75	6,17	6,86	6,71	

Skor dimensi politik 2015 adalah **6,79**, yang merupakan skor tertinggi dibanding skor dimensi ekonomi (4,78) dan masyarakat sipil (5,75). Skor dimensi politik selalu paling tinggi dibanding dua dimensi yang lain sejak pengukuran indeks demokrasi dilakukan (2011). Skor dimensi politik 2015 dihasilkan dari skor liberalisasi 6,81 dan skor ekualisasi 6,78.

Dimensi Politik 2015:

Makin Kuatnya Kebebasan Sipil

- ❖ Skor dimensi politik 2015 memang mencapai yang tertinggi dalam 5 tahun ini.
- ❖ Pada 2011, skor dimensi politik adalah 5,50 yang kemudian mengalami kenaikan signifikan pada 2012 sebesar 0,66 poin menjadi 6,16.
- ❖ Skor dimensi politik mengalami penurunan signifikan pada 2013 sebesar 0,68 poin, yaitu dari 6,16 pada 2012 menjadi 5,48 pada 2013. Lalu secara dramatis, skor dimensi politik mengalami kenaikan pada 2014 dengan selisih mencapai 1,24 poin dari skor 2013 (dari 5,48 menjadi 6,72).
- ❖ Seperti diketahui 2014 merupakan tahun pemilu di mana Presiden SBY tidak bisa mencalonkan lagi sehingga muncul persaingan terbuka dan ketat di antara kekuatan politik. Pada 2014 pula ada fenomena relawan politik yang merujuk pada munculnya kelompok-kelompok warga terorganisir untuk mendukung kandidat tertentu (khususnya pilpres).
- ❖ Namun skor dimensi politik hanya bergerak sangat sedikit pada 2015 ini, yaitu hanya berselisih 0,07 poin dibandingkan skor 2014 (dari 6,72 menjadi 6,79).

Dimensi Politik 2015:

Makin Kuatnya Kebebasan Sipil

- ❖ Skor dimensi politik yang stagnan sekaligus mengkonfirmasi perubahan elit dan partai politik dari 2014 ke 2015 yang ditandai oleh bergesernya polarisasi politik elit (di 2014) menuju kompromi politik (di 2015). Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya *reshuffle* kabinet yang mengakomodasi kekuatan politik partai-partai (termasuk yang semula berada di blok berlawanan dengan pemerintah) dan bubarnya KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat).
- ❖ Secara umum, otonomi politik (skor 7,75) yang menjadi bagian dari kebebasan politik mendapatkan skor tertinggi jika dibandingkan sub-variabel lainnya (kompetisi, pluralisasi, dan solidaritas). Bahkan otonomi politik menjadi sub-variabel yang mengalami kemajuan paling pesat selama 5 tahun pengukuran Indeks Demokrasi Asia di Indonesia. **Tingginya skor ini menunjukkan sudah semakin kuatnya kebebasan sipil.**

SKOR INDEKS DIMENSI EKONOMI 2015

DIMENSI EKONOMI	Liberalisasi		Ekualisasi		Skor
	5,43		4,34		4,78
	Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas	
	5,36	5,50	3,20	4,18	

Skor dimensi ekonomi 2015 adalah **4,78** yang merupakan skor terendah dibanding skor dimensi politik (6,79) dan dimensi masyarakat sipil (5,75). Di sisi lain, pencapaian skor dimensi ekonomi pada 2015 ini merupakan yang tertinggi sejak 2011, dan juga mengalami kenaikan sangat penting dibandingkan skor 2014.

Dimensi Ekonomi 2015: Ketidaksetaraan dalam Ekonomi Makin Akut

- ❖ Skor dimensi ekonomi 2015 yang sebesar **4,78** dihasilkan dari dua skor variabel utama yaitu liberalisasi sebesar 5,43 dan ekualisasi sebesar 4,43. Jika dilihat perkembangan dari masing-masing variabel sejak pengukuran indeks tahun 2011 hingga 2015, kenaikan dalam variabel liberalisasi lebih tinggi daripada ekualisasi.
- ❖ Data menunjukkan pada 2014, skor liberalisasi dalam dimensi ekonomi sebesar 5,02 dan skor ekualisasi sebesar 4,00.
- ❖ Kemudian pada 2015 nilai skor dua variabel tersebut meningkat, yaitu liberalisasi naik 0,41 poin dibanding skor 2014, dan ekualisasi naik 0,34 dibanding skor 2014.

Skor Dimensi Ekonomi dalam Indeks Demokrasi Asia

Kasus Indonesia pada 2011 - 2015

Tahun	Skor Dimensi Ekonomi	Selisih
2011	4,24	--
2012	4,21	Turun 0,03
2013	4,49	Naik 0,28
2014	4,41	Turun 0,08
2015	4,78	Naik 0,37

Dimensi Ekonomi 2015:

Ketidaksetaraan dalam Ekonomi Makin Akut

- ❖ Skor dimensi ekonomi selalu yang paling rendah dibandingkan skor dimensi politik dan masyarakat sipil yaitu berada di kisaran angka 4 (skala 1-10).
- ❖ Pada 2011 skornya adalah 4,24 kemudian mengalami kondisi turun naik pada 2012 hingga 2014, untuk kemudian naik secara signifikan pada 2015 dengan selisih mencapai 0,37 poin dibanding skor 2014 – dari 4,41 menjadi 4,78 – tetapi masih tetap pada kisaran angka 4 (skala 1-10) dan terendah dibanding dua dimensi lainnya.

Variabel ekualisasi memiliki dua sub variabel yaitu **pluralisasi dan solidaritas**, yang dalam dimensi ekonomi memiliki kecenderungan rendah dibandingkan dua dimensi lainnya dalam 5 tahun ini. Pada dimensi ekonomi 2015, skor sub variabel pluralisasi lebih rendah dibanding solidaritas yaitu 3,2 berbanding 4,18. Tetapi **justru skor sub variabel solidaritas yang mengalami penurunan signifikan dibanding skor yang diraihny pada 2014, sedangkan skor sub variabel pluralisasi naik dari 2014 ke 2015 ini**. Simak data berikut ini:

	Pluralisasi dalam dimensi ekonomi	Selisih	Solidaritas dalam dimensi ekonomi	Selisih
2014	2,88		4,80	
2015	3,20	Naik 0,32	4,18	Turun 0,62

Dimensi Ekonomi 2015: Ketidaksetaraan dalam Ekonomi Makin Akut

- ❖ Fenomena turunnya skor solidaritas dalam dimensi ekonomi sangat menarik karena terjadi di tengah adanya program jaminan sosial (seperti BPJS) dan program-program pemerintah yang bersifat perlindungan untuk orang miskin (kartu-kartu sejahtera untuk kesehatan dan pendidikan) sebagai program unggulan pemerintahan Jokowi.
- ❖ Indikator sub variabel solidaritas dalam dimensi ekonomi antara lain adalah perlindungan untuk orang miskin, asuransi/jaminan sosial, kontrol publik terhadap perusahaan, dan level partisipasi serikat-serikat pekerja.
- ❖ Turunnya skor solidaritas dalam dimensi ekonomi yang dramatis patut dicermati sebagai peringatan bahwa program-program kesejahteraan dan perlindungan untuk kelompok marginal (miskin) belum berjalan maksimal dan secara substansi belum menunjukkan kesetaraan akses sumber daya.

Dimensi Ekonomi 2015: Ketidaksetaraan dalam Ekonomi Makin Akut

- ❖ Skor pluralisasi dalam dimensi ekonomi menunjukkan tidak berubahnya struktur perekonomian yang monopolistik di Indonesia. Hal ini terlihat dengan semakin menguatnya monopoli dari kelompok-kelompok tertentu, ketimpangan antarwilayah, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pemilikan asset serta ketimpangan dan diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Menurunnya skor sub-variabel solidaritas secara signifikan di tahun 2015 menunjukkan semakin rendahnya kemampuan serikat pekerja dan masyarakat pada umumnya untuk mengontrol dan memengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan besar atau korporasi.
- ❖ Pencapaian skor dimensi ekonomi pada 2015 ini dapat dimaknai **sebagai belum berhasilnya transformasi struktur perekonomian yang monopolistik dan oligarkis setidaknya dalam 5 tahun ini**. Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2015 juga dipengaruhi oleh lesunya perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi 5,04% di triwulan IV tahun 2015 mendorong pemerintah Jokowi-JK menginisiasi kebijakan-kebijakan yang sangat pro-pasar dengan menekankan pada pembangunan infrastruktur, kemudahan untuk mendatangkan investor asing termasuk mempermudah pemilikan asing terhadap beberapa sumber daya alam seperti air dan tambang. Dengan kata lain, nilai-nilai dari sistem ekonomi kerakyatan yang ditawarkan dalam Nawacita pada masa kampanye Jokowi-JK tidak menjadi landasan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang. Sebagai dampak dari pilihan kebijakan tersebut, struktur perekonomian yang monopolistik tidak mengalami pergeseran.

SKOR INDEKS DIMENSI MASYARAKAT SIPIL 2015

Dimensi MASYARAKAT SIPIL	Liberalisasi		Ekualisasi		Skor
	5,95		5,43		5,75
	Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas	
	5,35	6,67	5,47	5,37	

Skor dimensi masyarakat sipil 2015 adalah **5,75** yang lebih rendah dibanding skor dimensi politik (6,79) tetapi lebih tinggi dari dimensi ekonomi (4,78). Skor tersebut meningkat 0,60 dari tahun 2014 (5,15). Dengan selisih 0,60 poin dari 2014 maka **skor dimensi masyarakat sipil mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan skor dimensi ekonomi dan politik**. Naiknya secara signifikan skor dimensi masyarakat sipil sebesar 0,6 dari 2014 ke 2015 menunjukkan ada dinamika demonopolisasi yang cukup intens selama setahun terakhir ini.

Dimensi Masyarakat Sipil: Bebas tapi Pengorganisasian Belum Kuat

- ❖ Hampir seluruh sub-variabel (otonomi, kompetisi, dan pluralisasi) mengalami peningkatan. Hanya sub-variabel solidaritas yang relatif stagnan. Sub-variabel otonomi meningkat 0,45 poin (dari 4,90 di 2014 menjadi 5,35 di 2015). Sub-variabel kompetisi, mengalami peningkatan 0,84 poin (dari 5,83 di 2014 menjadi 6,67 di 2015). Untuk sub-variabel pluralisasi, skor meningkat 0,97 poin (4,50 di 2014 menjadi 5,47 di 2015). Sementara solidaritas mengalami penurunan 0.01 poin (5,38 di 2014 menjadi 5,37 di 2015).
- ❖ Skor tersebut menunjukkan masyarakat sipil **mengalami penguatan yang signifikan**. Masyarakat sipil relatif bebas dari pengaruh kekuatan negara dan pasar, serta relatif independen untuk membawa aspirasi publik. Namun **penguatan masyarakat sipil belum diikuti kesadaran membangun organisasi yang kuat agar dapat memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah**. Penguatan masyarakat sipil juga belum mampu mendorong keberpihakan negara pada kelompok marjinal.

TANTANGAN KE DEPAN DEMOKRASI INDONESIA

- ❖ Dari pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia 2015, masalah yang terbesar terdapat pada dimensi ekonomi yang masih monopolistik.
- ❖ Kemajuan demokrasi atau terjadinya demonopolisasi akan sangat tergantung pada kemajuan secara bersamaan variabel otonomi, kompetisi, pluralisasi dan solidaritas dalam tiga dimensi politik, ekonomi, dan masyarakat sipil.
- ❖ Perlunya pemahaman bahwa demokrasi merupakan inter relasi berbagai dimensi (politik, ekonomi, dan masyarakat sipil).
- ❖ Salah satu tantangan terbesar bagi demokrasi Indonesia ke depan adalah mengatasi masalah fragmentasi dan belum kuatnya pengorganisasian masyarakat sipil untuk mendorong demonopolisasi pada ranah politik dan ekonomi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

1. Riaty Raffiudin (No HP: 0815 741 99 619)
2. Panji Anugrah Permana (No HP: 0857 231 1567)
3. M. Ridho (No. HP: 0812 8056 8170)

PUSKAPOL FISIP UI

Gedung B, lantai 2 Kampus UI FISIP UI

Depok 16424

Telp: (021) 786-5879

Fax: (021) 7888-7063

E-mail: puskapolui@gmail.com

TERIMA KASIH